LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

TRIWULAN I

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
BAB I KUESIONER SURVEI **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Dan Sasaran 2
C. Kuesioner Survei 2
BAB II METODOLOGI SURVEI **6**
A. Kriteria Responden 6
B. Metode Pencacahan 8
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis 10
BAB III PENGOLAHAN SURVEI **13**
A. Analisis Hasil Survei 13
B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah Hasil Survei 20
BAB IV DATA SURVEI **23**
A. Hasil Survei Dari Aplikasi SISUPER 23
B. Publikasi Hasil Survei 24
C. Data Responden 24
BAB V PENUTUP **29**
A. Kesimpulan 29
B. Rekomendasi 29
LAMPIRAN **30**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Berdasarkan Permen PAN & RB 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

Jakarta, 4 April 2022

	Mengetahui
Ketua Tim Survei	**Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta**
Berlin Damanik, S.H.,M.Hum	**Dr. H. Soedarmadji, S.H.,M.Hum.**

BAB I
KUESIONER SURVEI

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen terhadap pencegahan korupsi,Kementrian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disususnnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Sebagai salah satu syarat untuk tercapainya akreditasi penjaminan mutu sebagai pengadilan yang berkualitas (ICPE) yaitu dengan mengadakan Prespsi Anti Korupsi sebagai pedomannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 8 Juli 2021 memberlakukan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya dan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 Mei 2021. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di Lingkungannya .

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggaraan pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Dan Sasaran

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Kuesioner Survei

Dalam pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada pengguna layanan, kuesioner yang disusun mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN-RB. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	Tidak Sesuai Prosedur Jarang Sesuai Prosedur Sering Sesuai Prosedur Selalu Sesuai Prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta Imbalan tertentu ?	Petugas melayani selalu meminta imbalan Petugas melayani sering meminta imbalan Petugas melayani jarang meminta imbalan Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	Tidak Pernah Jarang

	Sering Selalu
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	Tidak Pernah Jarang Sering Selalu

8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	Selalu Sering Jarang Tidak Ada

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan terhadap responden yang datang ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang menggunakan aplikasi e-Court, yang mengakses website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/atau masyarakat yang mendapatkan manfaat layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Serta memiliki Kriteria Pendidikan Minimal SLTA dan Memiliki Kriteria Pekerjaan sebagai Berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Advokat
3. Wiraswasta
4. Pegawai Swasta
5. TNI/POLRI
6. Pelajar/Mahasiswa

Para responden yang sudah mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi melalui aplikasi SiSuper pada link https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ setelah dipetakan memiliki karakteristik sebagai berikut:

A.1. Tingkat pendidikan responden

Menurut tabel profil responden berdasarkan pendidikan terakhir pada survei triwulan I tahun 2022, profil responden berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas adalah S1 sejumlah 56 orang atau 71% dari total responden. Sementara responden dengan pendidikan terakhir SLTA/SMK menduduki urutan terkecil yaitu sejumlah 1 orang atau 1,3% dari total responden.

Tabel 1

Tingkat pendidikan responden

		Volume	Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA/SMK	1	1,3	1,3
	Diploma	9	11,4	12,7
	S1	56	70,9	83,5
	S2/S3	13	16,5	100
	Total	79	100	100
Total		79	100	

A.2. Pekerjaan responden

Berdasarkan tabel profil pekerjaan responden, menurut survei pada triwulan I tahun 2022, profil pekerjaan responden, mayoritas adalah para Pengacara/Advokat sejumlah 49 orang atau 62,0% dari total responden. Sementara responden yang berasal dari TNI/POLRI menduduki urutan terkecil yaitu sejumlah 1 orang atau 1,0% dari total responden.

Tabel 2

Jenis pekerjaan responden

		Volume	Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	10	13,0	13,0
	Pegawai Swasta	17	21,5	34,5
	TNI/POLRI	1	1,0	35,5
	Pelajar/mahasiswa	2	2,5	38,0
	Advokat/Pengacara	49	62,0	100
	Total	79	100	100
Total		79	100	

A.3. Kelompok Jenis Kelamin

Menurut tabel profil responden berdasarkan jenis kelamin pada survei triwulan I tahun 2022, profil jenis kelamin responden, mayoritas adalah laki-laki sejumlah 60 orang atau 76,0% dari total responden. Sementara responden berjenis kelamin

perempuan menduduki urutan terendah yaitu sejumlah 19 orang atau 24,1% dari total responden.

Tabel 3

Jenis Kelamin responden

		Volume	Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	60	75,9	76,0
	Perempuan	19	24,1	100
	Total	79	100	100
Total		79	100	

Selain pemetaan responden berdasarkan latar belakang Pendidikan, pekerjaan, dan jenis terlampir (Lampiran II) daftar nama dan nomor handphone para responden sebagaimana syarat pengajuan penilaian ZI.

B. Metode Pencacahan

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B.1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

B.2. Lokasi Survei Dan Unit Analisis

Lokasi survei adalah tempat dimana petugas melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data survei yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

B.3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka dan berupa pilihan ganda (*multiple* choice) melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) dengan menu pengisian data responden, pengisian layanan yang dibutuhkan responden, pengisian kuesioner serta pengisian saran dan masukan sebagaimana terlampir (Lampiran I).

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data untuk menentukan *indeks Persepsi Anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. ***Kedua***, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

C.1. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas

Tabel 4

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 5

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

A.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,949. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat bersih dari manipulasi peraturan semakin besar indeks yang didapat mengindikasikan bahwa pelayanan sesuai dengan prosedur dan mudah.

Tabel 6

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Tidak sesuai prosedur	0	0	0
	jarang sesuai prosedur	0	0	0
	Sering sesuai prosedur	4	5,0	5,0
	Selalu Sesuai prosedur	75	95,0	100
	Total	79	100	

A.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,962 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari penyalahgunaan jabatan. Semakin besar nilai indeksnya maka mengindikasikan bahwa semakin bersih pula Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melakukan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 7

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Petugas melayani meminta imbalan	0	0	0
	Petugas melayani sering meminta imbalan	0	0	0
	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	3,8	3,8
	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	76	96,2	100
	Total	79	100	

A.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,962. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari menjual pengaruh.

Tabel 8

Indeks pada indikator menjual pengaruh

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Selalu dihubungi	0	0	0
	sering dihubungi	0	0	0
	Jarang/Pernah dihubungi	3	3,8	3,8
	Tidak pernah dihubungi	76	96,2	100
	Total	79	100	

A.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,937. Sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah transparan dalam menginfokan biaya yang ada.

Tabel 9

Indeks pada indikator transparansi biaya

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Tidak mudah	0	0	0
	Jarang mudah	1	1,3	1,3
	Sering mudah	3	3,8	3,8
	Selalu mudah	75	95,0	100
	Total	79	100	

A.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,949. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari adanya transaksi rahasia.

Tabel 10

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Selalu	0	0	0
	Sering	0	0	0
	Jarang	4	5,0	5,0
	tidak pernah	75	95,0	100
	Total	79	100	

A.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,962, sehingga dapat dijelaskan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sesuai dan tidak melakukan penambahan biaya terhadap layanan apapun di luar tarif yang sudah ditetapkan .

Tabel 11

Indeks pada indikator tambahan biaya

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Selalu	0	0	0
	Sering	0	0	0
	Jarang	3	3,8	3,8
	Tidak pernah	76	96,2	100
	Total	79	100	

A.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,949, sehingga dapat diartikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari adanya aktivitas pemberian hadiah.

Tabel 12

Indeks pada indikator hadiah

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Selalu	0	0	0
	Sering	0	0	0
	Jarang	4	5,0	5,0
	tidak pernah	75	9,5	100
	Total	79	100	

A.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,949, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah transparan.

Tabel 13

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Selalu	0	0	0
	Sering	0	0	0
	Jarang	4	5,0	5,0
	Tidak pernah	75	95,0	100
	Total	79	100	

A.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,949 sehingga dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari tindakan percaloan.

Tabel 14

Indeks pada indikator percaloan

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Tidak Pernah	0	0	0
	Jarang	0	0	0
	Sering	4	5,0	5,0
	Selalu	75	95,0	100
	Total	79	100	

A.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,949 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15

Indeks pada indikator perbuatan curang

		Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Valid	Tidak Pernah	0	0	0
	Jarang	0	0	0
	Sering	4	5,0	5,0
	Selalu	75	95,0	100
	Total	79	100	

Dari 10 indeks indikator di atas, maka diperoleh hasil **Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebesar 3,95.** Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi anti korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah bersih dari korupsi.

Tabel 16

Indeks Persepsi AniKorupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No	*Unsur Pertanyaan*	*Nilai Rata-rata*
Q 1	*Manipulasi Peraturan*	**3,949**
Q 2	*Penyalahgunaan Jabatan*	**3,962**
Q 3	*Menjual Pengaruh*	**3,962**
Q 4	*Transparansi Biaya*	**3,937**
Q 5	*Transaksi Rahasia*	**3,949**
Q 6	*Biaya Tambahan*	**3,962**
Q 7	*Hadiah*	**3,949**
Q 8	*Tranparansi Pembayaran*	**3,949**
Q 9	*Percaloan*	**3,949**
Q 10	*Perbuatan Curang*	**3,949**
NNR Per RL		**39,519**

Indeks 39,519 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00

Tabel 17

Mutu Pelayanan

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PERADILAN UMUM
TRIWULAN I TAHUN 2022

NILAI IPK

3,95

NILAI INTERVAL KONVERSI

98,80

RESPONDEN

JUMLAH 79
JENIS KELAMIN : L = 60 / P = 19
PENDIDIKAN : SD = 0
SMP = 0
SMA = 1
DIPLOMA = 2
S1 = 37
S2 = 4

Periode survei = 01 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Tabel 18

Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 –100.00	4	Bersih dari korupsi

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
1	Tetap mempertahankan apa yang sudah diberikan dengan baik
2	Sangat baik harus dipertahankan
3	Agar di tingkatkan pelayanan yang ada
4	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada

B. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah Hasil Survei

Pelaksanaan hasil survei yang dilakukan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan I berada pada kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**". Semua unsur penilaian telah diapresiasi secara baik oleh masyarakat, berdasarkan urutan besarnya Survei Persepsi Anti Korupsi, didapatkan 3 unsur yang mendapatkan nilai terendah, yaitu:

1. Transparansi biaya (mudah dalam mendapatkan informasi tarif/biaya);
2. Pelayanan oleh Petugas di Pengadilan sesuai Prosedur (tidak ada Manipulasi Peraturan);
3. Informasi tarif/biaya (tidak ada biaya tambahan).

Dalam menindaklanjuti 3 (tiga) unsur terendah tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi biaya

   Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XI/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menginformasikan biaya sesuai dengan jenis layanan yang diterima sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XI/2018 dan termuat di Website Resmi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (https://www.pt-jakarta.go.id/).

2. Pelayanan oleh Petugas di Pengadilan sesuai Prosedur (tidak ada Manipulasi Peraturan)

   Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-. 144/KMA/SK/1/2011 Setiap Informasi telah ditetapkan baik unsur pelayanan informasi maupun tata cara pelayanan informasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjalakan segala bentuk layanan informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-. 144/KMA/SK/1/2011

3. Informasi tarif/biaya (tidak ada biaya tambahan).
   Mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-. 144/KMA/SK/1/2011 pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menginformasikan terkait biaya sesuai dengan jenis pelayanan dan melarang setiap pemberian baik berupa barang maupun uang diluar dari pada persyaratan jenis layanan

BAB IV
DATA SURVEI

A. Hasil Survei Dari Aplikasi SISUPER

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2022 berhasil meraih kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**" dengan nilai indeks sebesar **3,95** berdasarkan nilai indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh dari perhitungan dan analisis data survei serta perhitungan yang didapatkan dari aplikasi SISUPER.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
Jalan Let. Jend. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
DKI Jakarta
https://www.pt-jakarta.go.id/

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,95 / 98,80%

Jumlah	79 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 60	
	PEREMPUAN : 19	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 1
	SD : 0	Diploma 3 : 7
	SMP : 0	S1 : 56
	SMU : 2	S2 : 13
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 10	SWASTA : 17
	TNI : 1	WIRAUSAHA : 0
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 51	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,937
2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,949
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,949

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :
1. Tindak Lanjut Hasil 3 terendah Indeks Presepsi Anti Korupsi

1. Tarif/Biaya (transparasi biaya)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XI/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menginformasikan biaya sesuai dengan jenis layanan yang diterima sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XI/2018.

2. Manipulasi Peraturan

Berdasarkan *Surat Keputusan* Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-. 144/*KMA/SK/*1/2011 Setiap Informasi telah ditetapkan baik unsur pelayanan informasi maupun tata cara pelayanan informasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjalakan segala bentuk layanan informasi Publik sesuai dengan *Surat Keputusan* Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-. 144/*KMA/SK/*1/2011

3. Biaya Tambahan

mengacu pada *Surat Keputusan* Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-. 144/*KMA/SK/*1/2011 pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menginformasikan terkait biaya sesuai dengan jenis pelayanan dan melarang setiap pemberian baik berupa barang maupun uang diluar dari pada persyaratan jenis layanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 Maret 2023
Ketua Pengadilan Tinggi

B. Publikasi Hasil Survei

Publikasi informasi terkait hasil Survei Persepsi Anti Korupsi pada triwulan I oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dilakukan melalui pemasangan poster pada ruang tunggu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan infografis pada media sosial Pengadilan DKI Jakarta serta pada website PT DKI Jakarta di alamat https://www.pt-jakarta.go.id/publik/laporan-publik/laporan-spak/3677-laporan-spak-januari-s-d-maret-2022.html

C. Data Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2022 diikuti oleh 79 responden yang seluruhnya merupakan pengguna layanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun data dari para responden SPAK di triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut:

DATA RESPONDEN

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

TRIWULAN I TAHUN 2022

No.	Nama/Kode Responden	Pelayanan	Waktu Rekam	Nomor Handphone
1	R Hendra Gunawan	Layanan Pidana	Senin, 31 Januari 2022 | 11:20:09 WIB	085780234161
2	Dedi	Layanan Perdata	Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00:46 WIB	02156941739
3	Illian Deta Arta Sari	Layanan Perdata	Rabu, 26 Januari 2022 | 11:56:49 WIB	081282032922
4	Yohanes Wegi	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 26 Januari 2022 | 11:08:01 WIB	087875887373
5	ELFRIANTO	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 26 Januari 2022 | 10:33:53 WIB	081298598424
6	Agustinus	Layanan Perdata	Selasa, 25 Januari 2022 | 11:25:51 WIB	081386757515
7	Kristina Manalu	Layanan Perdata	Selasa, 25 Januari 2022 | 11:19:03 WIB	085261645770
8	Galang Yanuar	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 25 Januari 2022 | 10:32:35 WIB	085882607796
9	HARI JASURI	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 24 Januari 2022 | 12:01:07 WIB	081215956925
10	Morlan Marpaung, SH	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 24 Januari 2022 | 11:58:05 WIB	081388248112
11	T WILLIAM	Layanan Perdata	Senin, 24 Januari 2022 | 11:51:56 WIB	087886662672
12	Silvana Napitupulu	Layanan Perdata	Senin, 24 Januari 2022 | 11:47:27 WIB	081315524567
13	Paskah Pasaribu	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 24 Januari 2022 | 11:43:11 WIB	081315883049
14	JAENURI	Layanan Perdata	Rabu, 19 Januari 2022 | 11:29:00 WIB	081380143697
15	JIMMY	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 19 Januari 2022 | 10:12:00 WIB	081219779879
16	SAHAR	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 17 Januari 2022 | 12:01:22 WIB	02156585
17	Hanifah	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 14 Januari 2022 | 09:56:09 WIB	02224154544
18	HERNDARTO	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 14 Januari 2022 | 08:15:28 WIB	085214471708

19	Tri Turawan, S.H	Layanan Administrasi Umum	Kamis, 13 Januari 2022 | 11:18:12 WIB	087877058461
20	H. Muhammad Rawi	Layanan Perdata	Kamis, 13 Januari 2022 | 11:15:16 WIB	081262928711
21	RINO DAMANIK	Layanan Perdata	Kamis, 13 Januari 2022 | 09:44:21 WIB	085359605227
22	Mochamad Yusuf	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 11 Januari 2022 | 08:15:22 WIB	085359605227
23	Gun	Layanan Perdata	Selasa, 11 Januari 2022 | 08:13:05 WIB	08158420793'7
24	Cede Heryadi	Layanan Perdata	Selasa, 11 Januari 2022 | 08:10:15 WIB	085710044183
25	Polna Tua L.toruan, Sh	Layanan Perdata	Kamis, 6 Januari 2022 | 13:34:24 WIB	087886869550
26	Cece Heryadi, S.H	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 6 Januari 2022 | 13:13:29 WIB	085710044183
27	Muhamad Rio	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 6 Januari 2022 | 11:34:31 WIB	0895049419
28	Cornelius Rate Dira	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 6 Januari 2022 | 11:28:59 WIB	087874781444
29	Cheryl Yustika Purba	Layanan Pidana	Rabu, 23 Februari 2022 | 11:09:58 WIB	085778203600
30	Cheryl Yustika Purba	Layanan Perdata	Rabu, 23 Februari 2022 | 08:40:42 WIB	085778203600
31	Alberto Bc Londa	Layanan Perdata	Rabu, 23 Februari 2022 | 08:37:24 WIB	08121100920
32	DPP HAPI (KARTIKA CANDRA & KALI P	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 23 Februari 2022 | 08:31:11 WIB	082112994108
33	Faizal	Layanan Hukum / Informasi	Rabu, 23 Februari 2022 | 08:12:31 WIB	08158007303
34	Mohamad Taufik Harahap	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 22 Februari 2022 | 11:28:17 WIB	085692008333
35	Turmana Simanjuntak	Layanan Hukum / Informasi	Selasa, 22 Februari 2022 | 11:23:32 WIB	08176979768
36	Hakim	Layanan Perdata	Senin, 21 Februari 2022 | 10:37:48 WIB	081380151334
37	I Nyoman Kamustika	Layanan Perdata	Senin, 21 Februari 2022 | 10:32:50 WIB	0816741179
38	Micky	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 18 Februari 2022 | 09:48:07 WIB	081511625888
39	Lisdon Gultom	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 18 Februari 2022 | 09:07:58 WIB	081281008443
40	YULIANA	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 18 Februari 2022 | 09:05:18 WIB	08128148708
41	Caesar	Layanan Perdata	Kamis, 17 Februari 2022 | 08:20:35 WIB	081510720455
42	Fransiska Fiona Antolis	Layanan Perdata	Kamis, 17 Februari 2022 | 08:17:36 WIB	08114140527
43	Linda Rahmawati	Layanan Administrasi Umum	Senin, 14 Februari 2022 | 10:26:28 WIB	088706356552
44	Edgar	Layanan Perdata	Jumat, 11 Februari 2022 | 11:06:14 WIB	087786653586

45	Efan	Layanan Perdata	Jumat, 11 Februari 2022 | 10:45:12 WIB	013456789
46	ALBERTHUS	Layanan Perdata	Jumat, 11 Februari 2022 | 10:43:02 WIB	081241953509
47	Rio Maesa	Layanan Perdata	Jumat, 11 Februari 2022 | 09:39:44 WIB	081808912342
48	MUTHIA	Layanan Perdata	Selasa, 8 Februari 2022 | 09:10:33 WIB	089686121873
49	CDIUCI SRI SUNINGSIH	Layanan Perdata	Senin, 7 Februari 2022 | 11:55:06 WIB	08128130038
50	KRISTINA MANALU	Layanan Perdata	Senin, 7 Februari 2022 | 11:52:42 WIB	085261645770
51	KRISTINA MANALU	Layanan Perdata	Senin, 7 Februari 2022 | 11:35:26 WIB	085261645770
52	ANDI A. FALKI, SH, CLA, CLI	Layanan Perdata	Senin, 7 Februari 2022 | 11:24:56 WIB	082238362024
53	M Muchsin	Layanan Perdata	Senin, 7 Februari 2022 | 11:17:45 WIB	089504941901
54	Ikeu Tresnawati	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 4 Februari 2022 | 11:27:34 WIB	081391652126
55	IG. EKO P[URWANTO, SH., M.Hum.	Layanan Administrasi Umum	Jumat, 4 Februari 2022 | 11:15:52 WIB	08175493993
56	DONI EKA SAPUTRA	Layanan Hukum / Informasi	Jumat, 4 Februari 2022 | 11:07:20 WIB	0896617877558
57	Gugum Gumilar	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 3 Februari 2022 | 11:26:51 WIB	081298899136
58	Hadi	Layanan Hukum / Informasi	Kamis, 3 Februari 2022 | 11:24:14 WIB	081318219229
59	Lardi	Layanan Administrasi Umum	Kamis, 3 Februari 2022 | 11:21:26 WIB	0813333187777
60	Imelda Verawati	Layanan Perdata	Rabu, 30 Maret 2022 | 10:12:25 WIB	081222369517
61	Posmaroha Marbun, S.H	Layanan Administrasi Umum	Selasa, 29 Maret 2022 | 15:29:07 WIB	085888411265
62	Cheryl Yustika Purba	Layanan Pidana	Rabu, 23 Maret 2022 | 09:46:19 WIB	085778203600
63	JHON RICHO	Layanan Administrasi Umum	Senin, 14 Maret 2022 | 10:10:09 WIB	023456789
64	IRENE ANASTASIA ANTONO	Layanan Perdata	Senin, 14 Maret 2022 | 10:02:59 WIB	08113831985
65	Janter Manurung	Layanan Hukum / Informasi	Senin, 14 Maret 2022 | 10:00:38 WIB	081282109552
66	Prasetyo	Layanan Perdata	Kamis, 10 Maret 2022 | 10:11:46 WIB	08129560028
67	HARI MUHAMMAD	Layanan Perdata	Rabu, 9 Maret 2022 | 11:05:31 WIB	081215956925
68	BILLY	Layanan Pidana	Rabu, 9 Maret 2022 | 11:03:06 WIB	08111502424
69	ELLY Puspita Sari	Layanan Perdata	Rabu, 9 Maret 2022 | 11:00:53 WIB	0215818908
70	MARYANTO SH MH	Layanan Administrasi Umum	Senin, 7 Maret 2022 | 11:30:35 WIB	085718266915

71	INE SARI DEWI	Layanan Administrasi Umum	Senin, 7 Maret 2022 | 11:10:39 WIB	081266000743
72	Rino Damanik	Layanan Perdata	Senin, 7 Maret 2022 | 10:42:33 WIB	085359605227
73	DOAN CHRISTIANSEN DARREN	Layanan Perdata	Jumat, 4 Maret 2022 | 09:19:17 WIB	0811970925
74	IMADE SAPUTRA	Layanan Perdata	Jumat, 4 Maret 2022 | 09:16:34 WIB	082211919197
75	Juan Mulya	Layanan Perdata	Jumat, 4 Maret 2022 | 09:13:52 WIB	081311020206
76	Janteri	Layanan Tipikor	Rabu, 2 Maret 2022 | 09:26:53 WIB	081312813349
77	Yadi Nopriyadi	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 2 Maret 2022 | 09:13:33 WIB	081388145965
78	Mohamad Taufik Harahap	Layanan Perdata	Rabu, 2 Maret 2022 | 09:02:53 WIB	085692008333
79	Yarna Dewita S,h.,m.,m.h	Layanan Administrasi Umum	Rabu, 2 Maret 2022 | 08:11:52 WIB	0125489557

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,95 atau masuk pada kategori bersih dari korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,949
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,962
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,962
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,937
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,949
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,962
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 949
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,949
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,949
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,949

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2022 pada triwulan I tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,90 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Tranparansi biaya, Prosedur Pelayanan dan informasi tarif/biaya, memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

MENU PENGISIAN DATA RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER

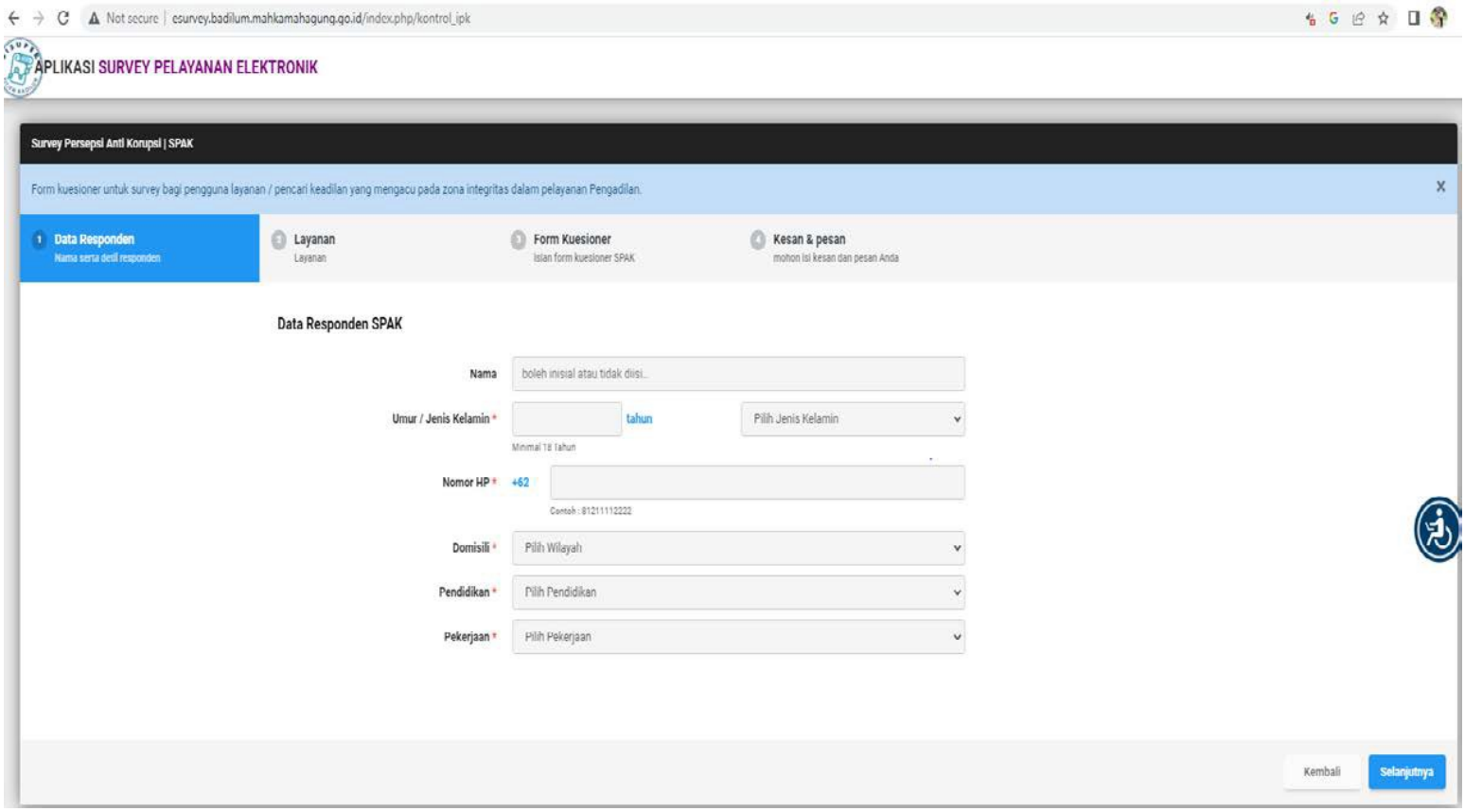

MENU PENGISIAN LAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

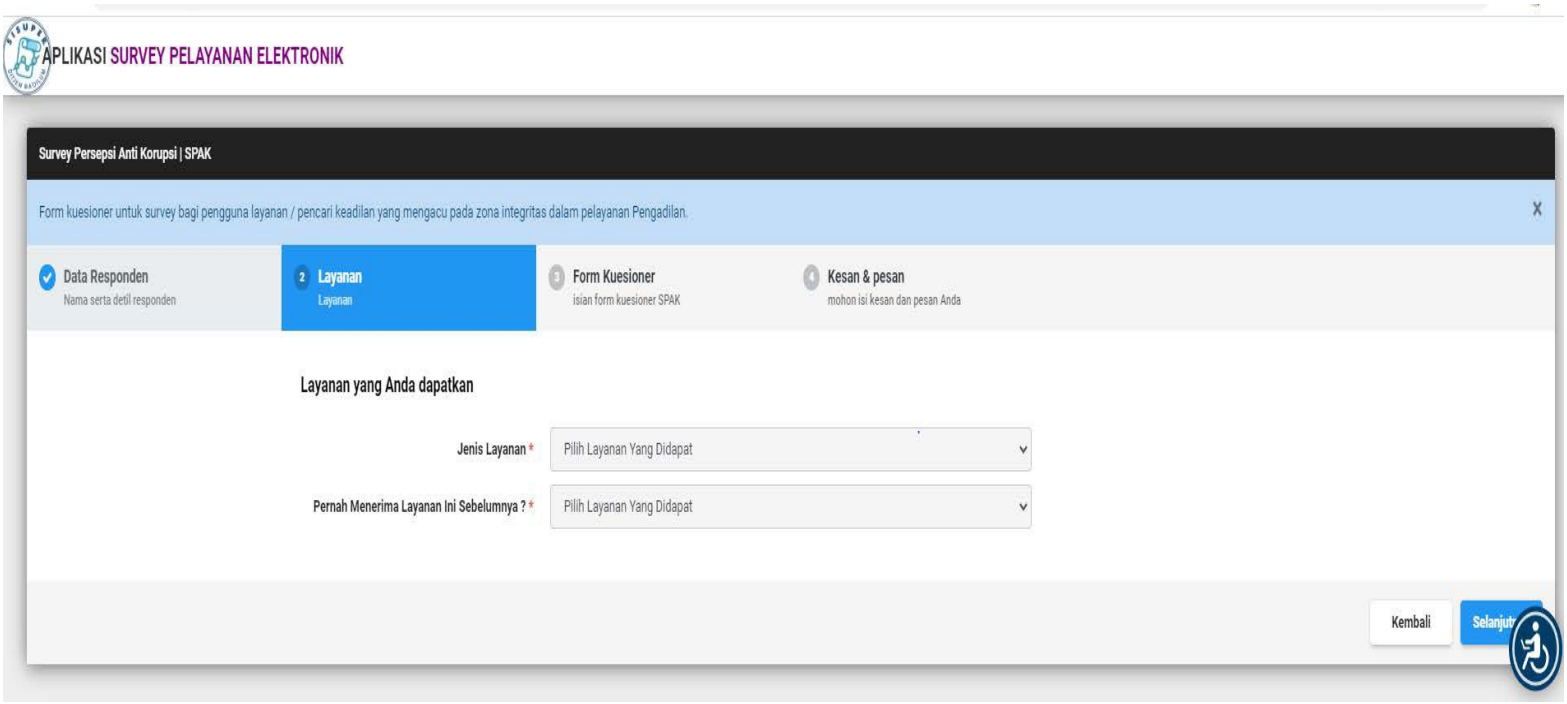
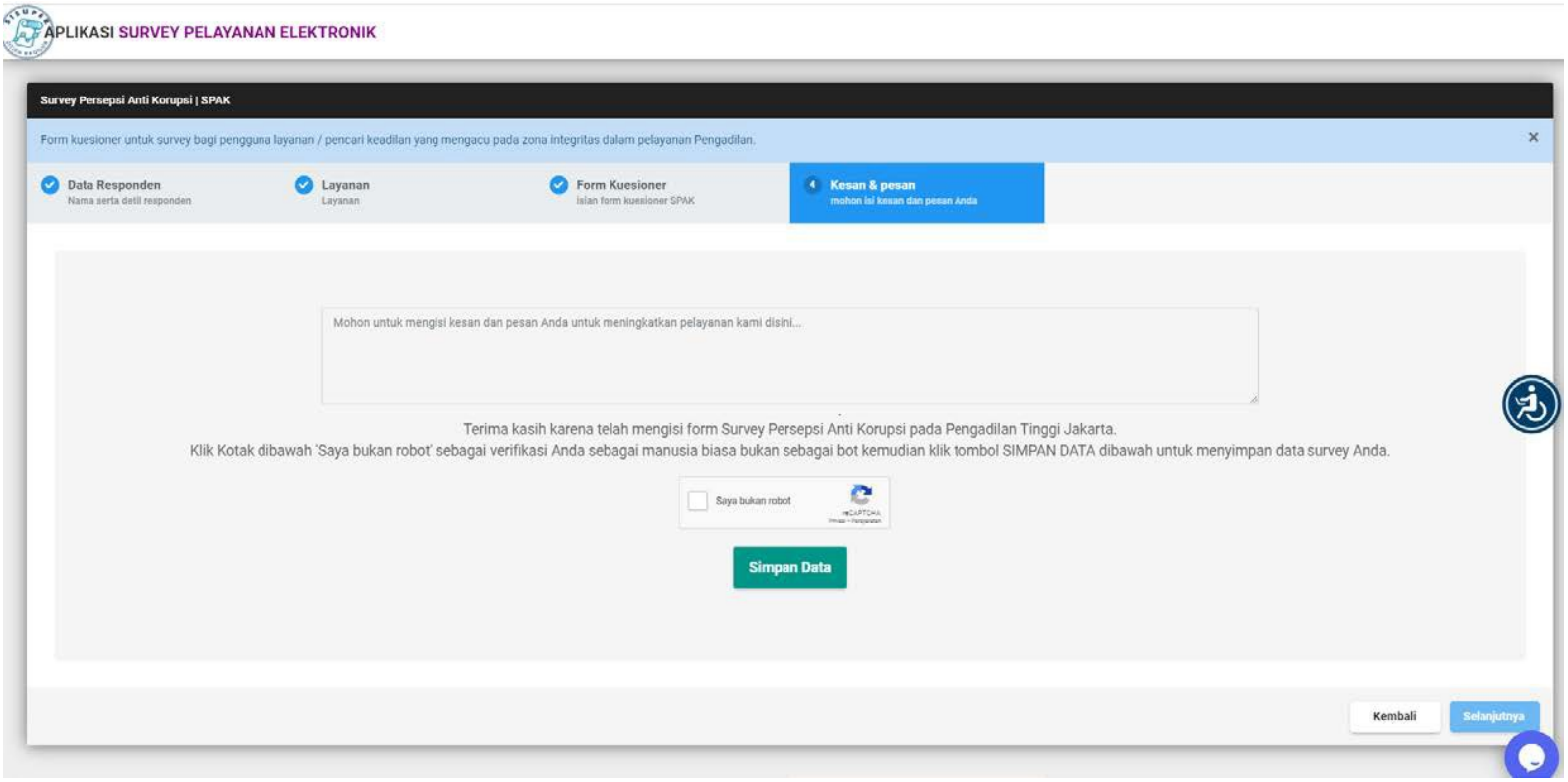
MENU SARAN DAN MASUKAN UNTUK RESPONDEN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA APLIKASI SISUPER